

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP**



OLEH:

**AYU ARISKA
NIM: 19. 2400.046**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Disusun oleh

**AYU ARISKA
NIM: 19. 2400.046**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Ayu Ariska

Nomor Induk Mahasiswa : 19. 2400. 046

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 2818/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H, Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Hj. Fahmiah Akilah, M.M.

NIP : 19880612 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Ayu Ariska

Nomor Induk Mahasiswa : 19. 2400. 046




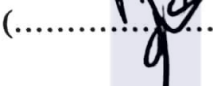
Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 2818/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Ketua)	(..... )
Hj. Fahmiah Akilah, M.M.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Umaima, M.E.I.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
مُحَمَّدِ الْهَادِي الْأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُمْ إِلَى الدِّيْنِيَوْمِ

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah-Nya, taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda saya Murni dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, serta saudaraku Karmila dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat yang membara kepada spenulis. Penulis mempersembahkan sepuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terimakasih.

Penulis telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H, Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Fahmiah Akilah, M.M. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 FEBI atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, S.Sy., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada ibu An Ras Try Astuti, S.E.,M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada masyarakat Kelurahan Duampanua selaku responden penulis yang telah ikut andil dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis terkhusus angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, teman PPI BSI Kabupaten Pangkep, teman KPM desa Ulusaddang Kabupaten Pinrang yang selalu memberikan banyak bantuan dikala penulis meminta bantuan serta selalu memberi semangat dan pengalaman yang luar biasa.
8. Seluruh pihak yang berjasa dalam proses penulisan skripsi ini baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jari'ah dan memberikan seluruh rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Juli 2023

26 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Ayu Ariska
19.2400.046

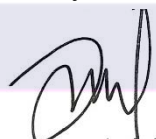
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ariska
NIM : 19.2400.046
Tempat/Tgl. Lahir : Passeno, 11 November 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2023
26 Dzulhijjah 1444 H
Penyusun,


Ayu Ariska
19.2400.046

ABSTRAK

AYU ARISKA. *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap* (dibimbing oleh H, Mukhtar Yunus dan Hj. Fahmiah Akilah).

Dengan adanya penyaluran BPNT di kelurahan Duampanua diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada kelompok sosial masyarakat miskin. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat kelurahan Duampanua, kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap kerap menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya adanya ketimpangan antara harga bahan pokok di *e-Warong*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.

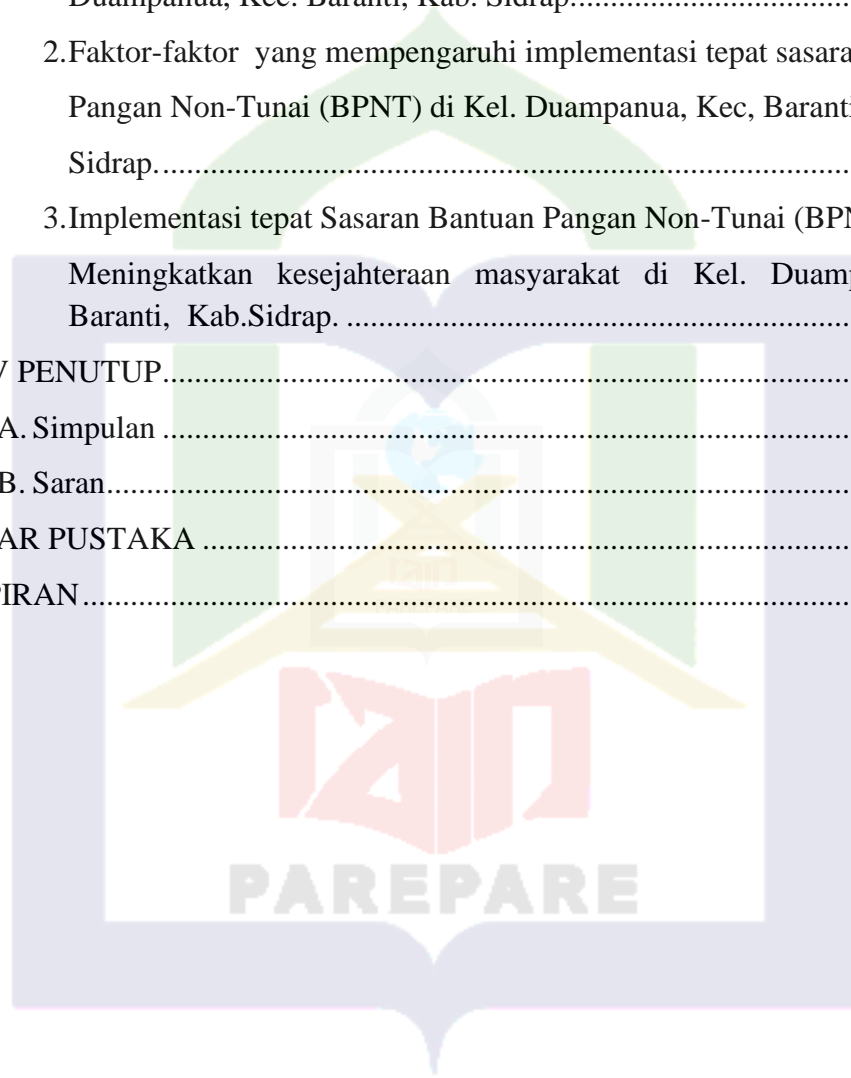
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) BPNT adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulannya kepada KPM untuk keperluan pembelian bahan makanan yang telah ditentukan. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran ada tiga yaitu komunikasi antar organisasi yang dilakukan dengan baik agar memastikan bahwa masyarakat mengerti mengenai BPNT ini, kemudian disposisi dengan memenuhi tanggung jawab, prinsip dan kewajiban masing-masing, dan sumber daya yang kompeten untuk pelaksanaan program BPNT, dan struktur birokrasi. 3) Berdasarkan indikator 6T bahwasanya program BPNT pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidaktepat sasaran yang masih belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Dalam hal ini penetapan nama rumah tangga harusnya bisa lebih efektif lagi kedepannya benar-benar dilakukan secara objektif, tidak semata-mata mengedepankan keluarga yang keadaan ekonominya mampu. Sebaiknya data penerima bantuan pangan non tunai selalu di perbaharui dan melakukan survey lanjutan. Kemudian survey dilakukan secara 3 bulan sekali sembari mengontrol keluarga penerima manfaat untuk mengetahui apakah dengan adanya BPNT ini bisa membantu keadaan ekonomi suatu keluarga.

Kata Kunci : BNPT, Kesejahteran, Masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoretis	17
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum	44
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	45
1. Implementasi Tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.....	45
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap.....	49
3. Implementasi tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab.Sidrap.	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu Beserta Persamaan dan Perbedaannya	8



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang	Terlampir
4	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti	Terlampir
5	Identitas Informan	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/يَـ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw	=	<i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.: editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.:“dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

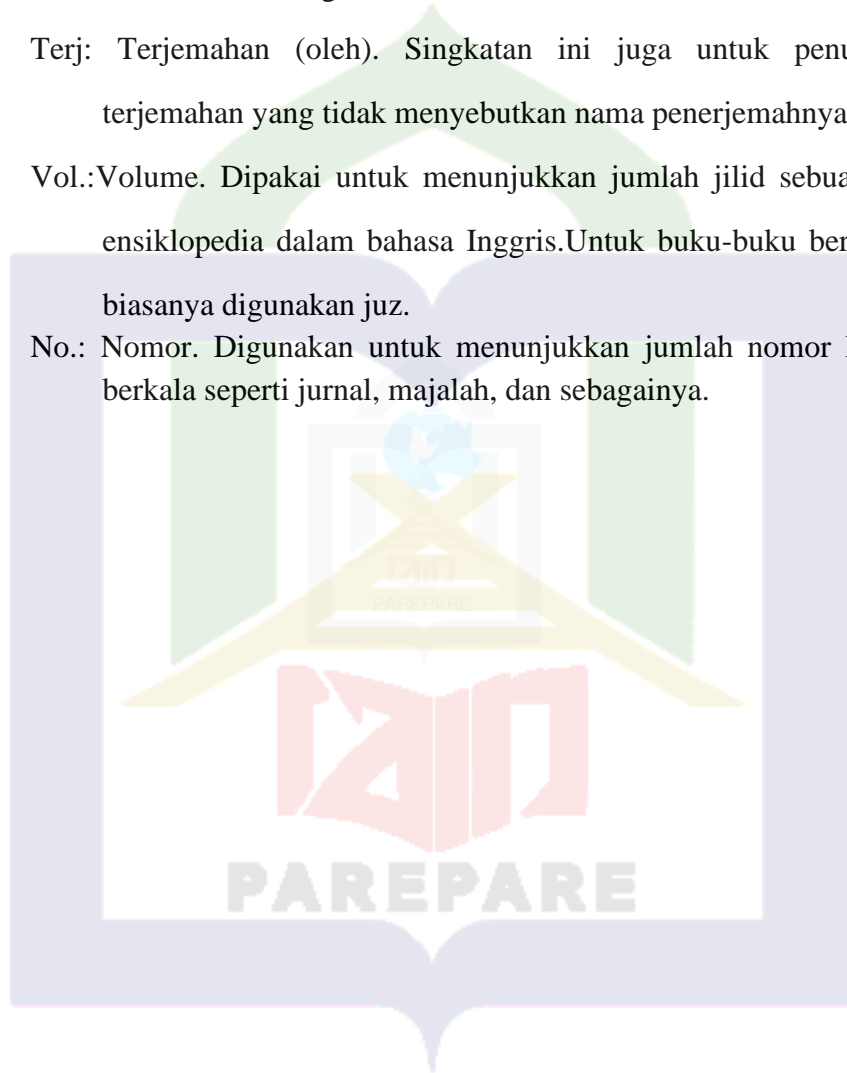
(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.:Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika kebutuhan manusia tidak ada habisnya dan tidak cukup sumber daya atau elemen produksi yang tersedia, disinilah masalah ekonomi muncul. Ada ketidakseimbangan antara tuntutan manusia yang tidak terbatas dan metode pemenuhan kebutuhan yang terbatas, yang merupakan masalah utama yang dihadapi perekonomian meskipun kebutuhan manusia tidak terbatas.¹ Kesulitan ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro adalah dua kategori di mana masalah ekonomi jatuh. Masalah penentuan harga dasar dan harga tertinggi, proses harga pasar, masalah distribusi, dan lain-lain adalah beberapa masalah ekonomi yang muncul dalam ekonomi mikro. Inflasi, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya juga hadir. Ini adalah topik krusial dalam masalah ekonomi makro.²

Salah satu masalah terbesar dan tersulit yang harus dihadapi setiap bangsa di dunia adalah kemiskinan.³ Ada banyak cara berbeda untuk mendefinisikan kemiskinan, dari ketidakmampuan sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang akan makanan dan tempat tinggal hingga definisi yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan pertimbangan sosial dan moral. Dalam arti terbatas, kemiskinan didefinisikan sebagai ketiadaan sumber daya yang diperlukan untuk

¹Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), h. 10.

²Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), h. 2.

³Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 14.

kehidupan seseorang, seperti uang dan barang. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks atau multidimensi.⁴

Ketidakmampuan penduduk suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, disebut sebagai kemiskinan. Penyebab kemiskinan lainnya adalah masyarakat yang tidak demokratis yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan menolak hak warga negara untuk memutuskan masalah apa pun yang penting bagi mereka, membuat mayoritas orang tidak memiliki akses ke tanah, sumber daya teknologi, dan keterampilan yang dapat dipasarkan. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan termasuk tingginya tingkat pengangguran, kesehatan fisik yang buruk, tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, dan tinggal di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁵

Masalah kemiskinan di Indonesia sangatlah rumit. Menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2022, 9,54% penduduk Indonesia tergolong miskin. orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, dengan 11,82 juta di antaranya tinggal di Pada Maret 2022, terdapat 26,16 juta perkotaan. dan 14,34 juta di pedesaan.⁶ Tentu saja angka kemiskinan masih cukup tinggi. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi perhatian sejak awal peradaban. Salah satu penyebab masalah kemiskinan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan kelangkaan pilihan pekerjaan.

⁴Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Fakultas Ekolobi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2015), h. 1

⁵Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung : Alvabeta, 2013), h. 74-75

⁶Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Maret 2022, diakses pada <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/presentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persem.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

Berikut adalah beberapa indeks utama kemiskinan suatu daerah menurut BAPPENAS: 1) Kekurangan pangan, sandang, dan papan; 2) Keterbatasan kepemilikan tanah dan alat-alat yang bermanfaat; 3) Keaksaraan yang belum matang; 4) Kurangnya keamanan dan kesejahteraan; 5) Kerentanan asuransi jiwa dan kesejahteraan; 6) Kerentanan dan keterpurukan di bidang sosial dan ekonomi; 7) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; dan 8) Terbatasnya akses pengetahuan. Kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kebutuhan gizi sebesar 2.100 kalori per orang per hari dari segi pangan, seperti yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi pada tahun 1998, sedangkan kebutuhan dari segi non pangan lebih dari sekedar sandang dan papan. untuk memasukkan pendidikan dan kesehatan.⁷

Ada beberapa karakteristik internal yang ada pada keluarga miskin yang berkontribusi terhadap kemiskinan mereka, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, motivasi dalam kehidupan sehari-hari, kemauan untuk tumbuh sebagai manusia, dan sebagainya. Aspek internal ini memang membutuhkan perhatian yang cukup besar guna meningkatkan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga.⁸

Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari kelebihan harta orang-orang

⁷Yovinda Rizki Amelia, *Model Tingkat Kemiskinan Kabupaten.Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2016)* Skripsi Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 24-25.

⁸Agus Sjfari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2.

kaya, sehingga tidak ada seorangpun yang hidup dalam kelaparan, atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal. Negara yang diwakili pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan. Sejalan dengan ajaran Nabi yang menghapus kemiskinan yang menyolok dalam masa awal kekhalifahan. Semua muslim saling menolong satu sama lainnya, dan yang terpenting bahwa kekhalifahan menjadi tumpuhan akhir bagi orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Umat Islam, sesungguhnya, adalah seperti satu tubuh yang mempunyai perasaan yang sama. Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh bagian yang lainnya merasakan akibat dari rasa sakit tersebut.⁹

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Memberikan dukungan sosial kepada masyarakat kurang mampu adalah salah satu caranya. Pemerintah Indonesia memperkenalkan program Beras untuk Orang Miskin (Raskin) pada tahun 2002. Raskin adalah inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nama Raskin diubah menjadi Rastra (Beras Sejahtera) pada tahun 2015. Satu-satunya perbedaan antara Rastra dan Raskin adalah Rastra memiliki nama yang berbeda agar terdengar lebih enak didengar oleh masyarakat.¹⁰

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah nama baru untuk program Rastra. Mencapai 6T lebih mudah dengan transfer dibandingkan dengan program Rastra. Tepat Sasaran, Tepat Kuantitas, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi adalah enam T yang disebutkan. BPNT atau bantuan sembako

⁹Umama, Umaima. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)*.” DIKTUM Jumal Syariah dan Hukum 12:2 (2014) 179-185.

¹⁰Megayana Masta, *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus*, skripsi (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), h. 2.

pemerintah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dengan menggunakan mekanisme rekening elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembelian sembako di *e-Warong KUBE* / toko sembako yang bermitra dengan Bank HIMBARA. Dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan KPM, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kontrol kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendukung penetapan tujuan, program BPNT bertujuan untuk mengurangi keuangan KPM. beban. kemajuan yang berkelanjutan. Dedikasi pemerintah untuk menyediakan pangan bagi rumah tangga penerima diwujudkan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).¹¹

Mulai tahun 2017, penyaluran BPNT akan dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia dengan fasilitas dan akses yang memadai. Selain menawarkan pilihan makanan, penyaluran BPNT juga dilakukan melalui sistem perbankan untuk mendorong perilaku produktif dengan memungkinkan penerima untuk menarik bantuan sesuai kebutuhan dan mendorong pembangunan aset melalui kemungkinan menabung. Melalui akses layanan keuangan yang lebih luas, penyaluran BPNT diantisipasi akan berpengaruh pada Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima.¹²

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang telah menerima penyaluran bantuan sembako nontunai adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, BPNT dilaksanakan secara seragam dan lengkap. Kecamatan BPNT di Kecamatan Baranti yang paling banyak menerima bantuan adalah

¹¹Ahmad Syauqi, *Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Program Beras Miskin di Kota Banjarmasin*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2011, h. 3-4.

¹²Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai* (Jakarta: 2017), h. iii.

Duampanua. Sejak tahun 2020, BPNT dipraktikkan di Kecamatan Duampanua. Diharapkan dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Duampanua dapat memerangi kemiskinan dan meningkatkan pengelompokan sosial sumber daya manusia yang kurang mampu di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan.

Namun, kenyataannya sering terjadi inkonsistensi saat BPNT disalurkan ke warga Kecamatan Duampanua dan Baranti serta Kabupaten Sidrap. Misalnya, adanya disparitas harga barang kebutuhan pokok di *e-Warong KUBE* / pedagang makanan yang berbisnis dengan Bank HIMBARA. Informan mengklaim bahwa ketika dihitung, sembako yang diperoleh melalui distribusi BPNT terkadang tidak cukup untuk menutupi nilai Rp. 200.000 sebagai uang tunai yang diberikan kepada KPM. Selain itu, sumber tersebut mengklaim bahwa penyaluran BPNT di Kecamatan Duampanua masih tidak tepat sasaran sehingga isu tepat sasaran menjadi kontroversial. Sebaliknya, ada sebagian orang yang dianggap kompeten tetapi mendapatkan BPNT. Masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan BPNT tapi tidak menerimanya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap?
3. Bagaimana implementasi tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap.
3. Untuk menjabarkan mengenai implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoretis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Secara teoretis menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan ekonomi syariah khususnya tentang implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara praktis berguna sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dalam hal implementasi anggaran Bantuan Pangan Non-Tunai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibahas dalam kajian ini sebagai sarana Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap). Sumber penelitian utama penulis adalah hasil wawancara langsung dengan informan lapangan. Hasil wawancara akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi untuk pengujian skripsi mereka.

Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini, tinjauan temuan penelitian umumnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang keterkaitan antara subjek yang diteliti dan penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Dalam pencarian referensi untuk penelitian mereka tentang subjek yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menemukan sejumlah penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Beserta Persamaan dan Perbedaannya

Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Anggi Anggrayni Siregar, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rantau Utara ini dilihat dari teori implementasi	Hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rantau Utara ini dilihat dari teori implementasi	Baik kajian tersebut yang akan dilakukan mengangkat isu adopsi bantuan pangan nontunai	Penelitian yang telah diuraikan di atas dan penelitian yang akan dilakukan berbeda yaitu penelitian yang diuraikan di atas hanya melihat bagaimana

<p>Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu</p>	<p>menurut Merille S. Grindle yaitu dari aspek isi kebijakan dan dari aspek lingkungan kebijakan. Selain itu juga dilihat dari indikator keberhasilan implementasi program BPNT yaitu 6T (6 Tepat), dimana 6T ini sangat menentukan kesuksesan suatu program BPNT di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Dari Indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini ada dua indikator yang tidak memenuhi yaitu tepat sasaran dan tepat</p>		<p>penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-warong, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti juga akan melihat bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Duampanua dengan bantuan dana Bantuan Pangan Non Tunai</p>
--	--	--	---

	<p>waktu. Kendala- Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program BPNT dan rendahnya tingkat kepatuhan implementor yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah.¹³</p>		
<p>2. Zulbaidah, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga</p>	<p>Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas hanya meneliti mengenai implementasi</p>

¹³ Anggi Anggrayni Siregar, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu* (Tesis Universitas Sumatera Utara: 2019).

	<p>yang kurang mampu. Kemudian disaat pandemi Covid-19 ini banyak kepala keluarga yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kejadian ini pemerintah memutuskan member kenaikan bantuan yang dulunya Rp 110.000 menjadi Rp 200.000 perbulannya. Diprogram BPNT ini juga para Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan</p>	<p>mengenai implementasi Bantuan Pangan Non Tunai.</p>	<p>penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai tanpa mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengkaji mengenai implementasi penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai juga akan mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua.</p>
--	---	--	--

	<p>dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah akan member memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan hambatan lainnya dalam proses penyediaan stok barang, yang mana terjadi bebas masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan pahunya habis dan akan didapatkan diminggu berikutnya atau pada saat</p>		
--	---	--	--

	pengambilan bansosnya selanjutnya. ¹⁴		
3. Basriati. B, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa	Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT	Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai implementasi Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas hanya	Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas hanya meneliti mengenai implementasi penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan parangloe tanpa mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengkaji mengenai implementasi

¹⁴Zulbaidah, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. xiii.

	<p>melalui E-Warong di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Parangloe sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat</p>	<p>meneliti mengenai implementasi penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan parangloe tanpa mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengkaji mengenai implementasi penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai juga</p>	<p>penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai juga akan mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai.</p>
--	---	--	---

	<p>beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat</p>	<p>akan mengkaji mengenai Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai.</p>	
--	---	---	--

	<p>sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.¹⁵</p>		
--	--	--	--

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Ketika sebuah kebijakan diimplementasikan, ada tindakan dan proses kegiatan yang terlibat. Dalam situasi ini, implementasi merupakan bagian penting dari proses kebijakan selama implementasi. Eksekusi suatu program dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilannya. Keberhasilan suatu program merupakan tujuan implementasi, sebagaimana dinyatakan dalam definisi implementasi Grindle yang berbunyi: “Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. Proses implementasi hanya akan dimulai ketika tujuan dan tujuan telah ditetapkan,

¹⁵Basriati. B, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*.(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. viii.

program kegiatan telah direncanakan, dan dana tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran”.¹⁶

Menurut etimologinya, implementasi mengacu pada suatu proses yang melibatkan pelaksanaan tugas dengan berhasil menggunakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kadang-kadang dilihat dalam arti luas sebagai cara mengoperasionalkan atau mengatur operasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga menjadi kesepakatan kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur, dan teknik secara sinergis didorong untuk berkolaborasi untuk menerapkan kebijakan ke arah yang diinginkan. Dasar pemikiran atau tujuan dari langkah tersebut tidak lain adalah untuk mengelola dan menjaga sikap, tindakan, dan pendapat dari semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan lebih baik. Dengan demikian, keseluruhan maksud dan tujuan program atau kebijakan dapat terpenuhi dengan baik.

“Memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan menjadi fokus perhatian pada implementasi kebijakan yaitu peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah pengesahan pedoman tersebut,” tulis Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam penjelasannya tentang maksud pelaksanaan ini. kebijakan yang meliputi baik upaya administrasi maupun upaya untuk benar-benar mempengaruhi atau berdampak pada masyarakat atau peristiwa”.

Komponen kunci dari fase penting dalam pengembangan suatu kebijakan adalah implementasinya. Jika dilihat dari sudut yang berbeda, implementasi

¹⁶Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. (New Jersey: Pricenton University Press, 1980), h.89.

merupakan fenomena rumit yang dapat dianggap sebagai proses, hasil, atau pengaruh. Implementasi juga dapat diartikan sebagai keluaran, atau sejauh mana tujuan yang dimaksudkan didukung, dalam konteks kebijakan, di mana itu dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan untuk membuat keputusan dapat diterima oleh legislatif sehingga mereka dapat diimplementasikan.¹⁷

b. Tahap-tahap dalam Implementasi

Langkah-langkah proses implementasi harus diperiksa untuk memahami masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan yang dibuat oleh lembaga pelaksana tentang kebijakan.
- 2) Kepatuhan terhadap pilihan oleh kelompok sasaran.
- 3) Efek dari pilihan yang dibuat oleh lembaga pelaksana.
- 4) Persepsi tentang bagaimana pilihan-pilihan tersebut akan dirasakan.
- 5) Perbandingan sistem politik dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa reformasi fundamental maupun inisiatif untuk melakukan reformasi isi/isi.

Saat membahas sistem umpan balik, semua langkah yang disebutkan di atas terkadang dikelompokkan menjadi satu. Namun dalam hal ini, ada dua proses yang berbeda. Tiga tahap pertama sangat penting untuk diperhatikan jika seseorang hanya peduli dengan pertanyaan tentang seberapa dekat pelaksanaan program akan benar-benar selaras dengan tujuannya. Namun, juga bermanfaat jika memperhatikan penilaian sistem politik terhadap undang-undang atau kebijakan, yang merupakan bagian dari langkah terakhir.

¹⁷ Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Layanan Public dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h.42.

Variabel dependen atau titik akhir (*end point*) dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing fase ini. Masing-masing fase ini juga berkontribusi pada keberhasilan fase sebelumnya. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan kebijakan lembaga pelaksana tidak diragukan lagi akan mengubah efek aktual keputusan tersebut. Ini tidak diragukan lagi merupakan faktor penting dalam penulisan ulang undang-undang atau upaya untuk melakukannya.¹⁸

c. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Erward mengemukakan empat unsur atau aspek yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel atau faktor tersebut meliputi *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.¹⁹

1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Seorang komunikator komunikasi adalah seseorang yang menyampaikan informasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan adalah proses transfer pengetahuan tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Para pelaku kebijakan harus mengumpulkan informasi tentang kebijakan publik untuk memahami isi, tujuan, arah, dan khalayak sarannya. Ini akan memungkinkan mereka untuk merencanakan dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik sehingga tujuan mereka dapat terpenuhi. terealisasi seperti yang diantisipasi.

2) Sumber Daya (*Resources*)

¹⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 203-204.

¹⁹Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), h.96.

Eksekusi kebijakan sangat dipengaruhi oleh masalah sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material, dan yang terkait dengan pengetahuan dan kekuasaan.²⁰

a) Sumber daya manusia

Sangat penting bahwa sumber daya manusia (*personel*) terampil dan memadai. Akibatnya, sumber daya manusia tidak hanya harus kompeten dalam menerapkan kebijakan tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, membuat rekomendasi, dan mengikuti arahan dari pemimpin. Jumlah karyawan yang dibutuhkan dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ditangani harus ditentukan secara akurat dan praktis oleh departemen sumber daya manusia.

b) Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan antara lain uang dan alat yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi suatu kebijakan. Pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus disediakan dengan tingkat kualitas yang terbatas karena keterbatasan anggaran.

c) Sumber daya peralatan

Bangunan, tanah, dan target adalah contoh sumber daya peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan pelaksanaan kebijakan dan semuanya akan mempermudah penyampaian layanan dalam menjalankan kebijakan.

²⁰Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), h.101.

d) Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Informasi yang dimaksud cukup dan relevan untuk memahami bagaimana menjalankan suatu kebijakan. Alat lain yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dijalankan adalah otoritas. Kemampuan suatu lembaga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh seberapa besar kekuatan pengambilan keputusan yang dimilikinya. Saat mereka menghadapi masalah dan menginginkan keputusan instan untuk memperbaikinya, otoritas ini sangat penting.

3) Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.²¹

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Karena ketidakefektifan sistem birokrasi, implementasi kebijakan mungkin masih belum berhasil. Struktur organisasi, hirarki kewenangan, hubungan antar unit organisasi di dalam organisasi tersebut, hubungan antar unit organisasi dengan organisasi lain, dan karakteristik lainnya termasuk dalam kerangka birokrasi ini. Untuk memudahkan dan menstandarkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya, kerangka birokrasi memuat aspek-aspek SOP.²²

²¹Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), h.105.

²²Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), h.106.

Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi intensif.

2. Teori Bantuan Pangan Non Tunai

a. Pengertian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Sesuai dengan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) didefinisikan sebagai bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bulanan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme uang elektronik yang hanya digunakan untuk membeli makanan dari penjual makanan, atau yang dikenal dengan *E.-Warong*, yang bekerja sama dengan bank penyalur.²³

Bantuan pangan nontunai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong inklusi keuangan. BPNT diimplementasikan melalui sistem perbankan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk mengelola, memantau, dan meminimalkan penyimpangan yang timbul selama pelaksanaan program. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan perilaku pro-aktif penerima manfaat.

Pemerintah memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai yang digunakan semata-mata untuk pembelian pangan dari penjual makanan/*e-warung KUBE* yang bekerjasama dengan bank HIMBARA .

Bantuan sosial termasuk bantuan pangan nontunai (BPNT). Orang yang paling tidak beruntung biasanya mendapatkan bantuan sosial, sejenis program

²³ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 1.

jaminan sosial, dalam bentuk uang tunai, barang, atau pembayaran kesejahteraan, yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Biasanya, penerima program ini dipilih berdasarkan "tes kemiskinan" tanpa memperhitungkan kontribusi sebelumnya, seperti pembayaran pajak atau pembayaran asuransi. Populasi sasaran bantuan sosial meliputi keluarga berpenghasilan rendah, pengangguran, anak-anak, lansia, individu dengan gangguan fisik dan mental, minoritas, yatim piatu, orang tua tunggal, pengungsi, dan mereka yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.²⁴

b. Tujuan program BPNT

Program BPNT berupaya untuk:

- 1) Mengurangi beban keuangan keluarga penerima manfaat dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangannya;
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat; Dan
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan sembako bagi keluarga penerima manfaat.
- 4) Memberi KPM lebih banyak pilihan dan kendali atas cara memenuhi kebutuhan pangan mereka,
- 5) Mempromosikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁵

²⁴Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 88-89.

²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 2.

Dengan memberikan bansos sembako, program BPNT berupaya meringankan beban keuangan pengeluaran KPM di kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Manfaat program BPNT

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM dan menyediakan mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial;
- 3) Memajukan agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk meningkatkan transaksi non tunai; Dan
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.²⁶

d. Prinsip utama program BPNT

- 1) Mudah diakses dan digunakan oleh KPM,
- 2) Memberikan KPM pilihan dan kendali atas kapan, berapa banyak, jenis apa, berapa banyak, dan dimana membeli makanan (nasi dan telur) berdasarkan preferensi (tidak ditargetkan pada E-Warong tertentu dan bahan makanan tidak dikemas),
- 3) Mendorong usaha ritel rakyat untuk berkembang dengan melayani KPM,
- 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM dan pelaku usaha eceran rakyat,

²⁶ Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 4.

- 5) Memungkinkan E-Warong membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternative pasokan yang lebih optimal untuk membeli makanan.
 - 6) Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- e. Syarat dan kriteria calon penerima BPNT

Syarat dan kriteria calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai menurut kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah sebagai berikut.²⁷

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing masing anggota keluarga.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- 3) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- 4) Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- 5) Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- 6) Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
- 7) Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.

²⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 6.

- 8) Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
- 9) Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
- 10) Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600.000 per bulan.
- 11) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- 12) Tidak memiliki harta senilai Rp500.000 seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

f. Indikator Tercapainya BPNT

Berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi ditentukan kinerja program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).²⁸

- 1) Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi identitas.

²⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 8.

- 2) Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan.
 - 3) Tepat harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya.
 - 4) Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - 5) Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi.
 - 6) Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
- g. Proses Penyaluran BPNT

Mulai Januari 2017, penyaluran BPNT akan dilakukan di beberapa lokasi terpilih yang telah menyiapkan bahan pangan, jaringan telekomunikasi yang siap, dan kerja sama pemerintah daerah.

Bantuan pangan non tunai diberikan dengan tarif Rp. 200.000 / KPM / bulan. Bantuan ini hanya boleh ditukar di *E-warong* dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan itu tidak dapat diterima secara tunai. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga beras dan/atau telur dipilih sebagai komoditas. Berdasarkan temuan evaluasi, dimungkinkan untuk memutuskan jenis komoditas apa yang harus ditambahkan untuk memenuhi tujuan tersebut.²⁹

²⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 9.

Adapun indikator dalam penyaluran BPNT antara lain mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi. Mekanisme penyaluran BPNT dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Registrasi/ pembukaan rekening
- 2) Edukasi dan sosialisasi
- 3) Penyaluran dan
- 4) Pembelian barang.

Jaringan sistem pembayaran elektronik yang saling terhubung, termasuk bank penyalur, prinsipal, dan perusahaan switching, digunakan untuk melakukan distribusi BPNT. KPM dapat menggunakan Bansos Pangan BPNT di pasar tradisional, warung, toko kelontong, *e-Warong KUBE*, Rumah Pangan Kita (RPK), Warung Desa, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), Agen Laku Pandai, atau tempat lain yang menawarkan bahan makanan.³⁰

3. Teori Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah sejahtera, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti aman, selamat, sejahtera, dan selamat (terlepas dari segala jenis gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya), berasal dari kata sejahtera. Kata Sanskerta “catera” yang berarti payung memiliki arti yang sama dengan kata “makmur” dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah individu yang sukses, khususnya yang menjalani kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran untuk hidup aman dan tenteram jasmani dan rohani.³¹

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 11.

³¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

Kemakmuran adalah ungkapan umum untuk keadaan bahagia, keadaan di mana orang-orang sejahtera, sehat, dan damai. Kemakmuran dalam ilmu ekonomi disamakan dengan keuntungan yang nyata. Kesejahteraan memiliki definisi resmi atau teknis tertentu, seperti dalam hal fungsi kesejahteraan sosial (lihat ekonomi kesejahteraan). Kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial mengacu pada berbagai layanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dibuktikan dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan yang memadai, biaya kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan bermutu tinggi, atau keadaan di mana setiap orang mampu memaksimalkan kegunaannya dalam suatu rentang tertentu. kendala keuangan, serta keadaan di mana kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi.³²

Untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, serta untuk mengurangi timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat, kesejahteraan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Agar tercipta lingkungan yang damai dalam masyarakat, setiap individu memerlukan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera secara materi maupun non materi.³³

Beberapa individu secara konstan menghubungkan kesejahteraan dengan gagasan kualitas hidup. Gagasan tentang kualitas hidup yang tinggi memunculkan gambaran tentang situasi kehidupan yang nyaman. Kualitas hidup didefinisikan oleh *World Health Organization* sebagai pandangan hidup seseorang dalam masyarakat dalam kerangka budaya dan sistem nilai yang sekarang berlaku dalam

³²Dura, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Jibeka*, Volume. 10, No. 1, h. 24.

³³Ahmad Majdi tsabit, Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat.

hal tujuan, harapan, standar, dan kepedulian terhadap kehidupan. Karena dipengaruhi oleh keadaan psikologis seseorang, tingkat kemandirian, dan interaksi sosial dengan lingkungannya, gagasan ini memiliki konotasi yang lebih luas.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Ada beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Rasa kesejahteraan seseorang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu saat diukur. Pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya merupakan beberapa faktor yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan.³⁴

Sesuai dengan Undang-undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009. Agar manusia dapat hidup sejahtera, mengembangkan pribadinya, dan menjalankan peran sosialnya, maka perlu disediakan kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat tertentu atas kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara memadai karena belum mendapatkan bantuan sosial dari negara. Akibatnya, sebagian warga tetap menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat hidup layak dan bermartabat.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

³⁴Dahlia Sukmasari, Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an, *At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, h. 3-4.

- 1) Tingkat pendapatan keluarga,
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan,
- 3) Tingkat pendidikan keluarga,
- 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya,
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya,
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya,
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

c. Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam

Seseorang dianggap sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, air minum bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang layak yang akan menunjang kehidupannya. taraf hidup mereka dan memberi mereka kedudukan sosial yang lebih tinggi, kedudukan sosial yang sama dengan tetangga.³⁵

³⁵Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 24.

Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (*maslahah*) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), keluarga (*nasl*), harta (*maal*) dan akal (*aql*).

Ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam rahmatan lil alamin mencakup konsep kesejahteraan. Namun, menerima manfaat yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah sebuah kebutuhan. Jika seseorang mengikuti perintah dan tidak melakukan perilaku yang dilarang, Allah swt akan memberi mereka kemakmuran.³⁶ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/16:97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT diberi jaminan atau janji kesejahteraan. Selain itu, Allah SWT. akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar atas amal kebbaikannya yang banyak dengan balasan yang lebih besar dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mencakup semua manifestasi ketenangan dalam bentuk apa pun, menyenangkan, nyaman, dan senang dengan makanan yang sah.

³⁶Ahmad Majdi tsabit, Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. h. 7-8.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Rajawali Perss, 2000), h. 598.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual mengacu pada hubungan atau hubungan antara beberapa konsep yang terkait dengan masalah yang diteliti. Judul kajiannya adalah “Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap),” dan dilakukan. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan detail, judul harus dibatasi maknanya karena mengandung kata-kata penting. Berikut ini adalah deskripsi tinjauan konseptual:

1. Implementasi

Menurut etimologinya, implementasi mengacu pada suatu proses yang melibatkan pelaksanaan tugas dengan berhasil menggunakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan.

2. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagaimana dimaksud oleh Kementerian Sosial adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bulanan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme uang elektronik yang hanya digunakan untuk membeli makanan dari penjual makanan, juga dikenal sebagai "*E. Warong*", yang bekerja sama dengan bank penyalur.³⁸

3. Kesejahteraan

Istilah sejahtera, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti aman, selamat, sejahtera, dan selamat (terlepas dari segala jenis gangguan, kesulitan,

³⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 1.

dan lain sebagainya), berasal dari kata sejahtera. Kata Sanskerta “catera” yang berarti payung memiliki arti yang sama dengan kata “makmur” dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah individu yang sukses, khususnya yang menjalani kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran untuk hidup aman dan tenteram jasmani dan rohani.³⁹

4. Masyarakat

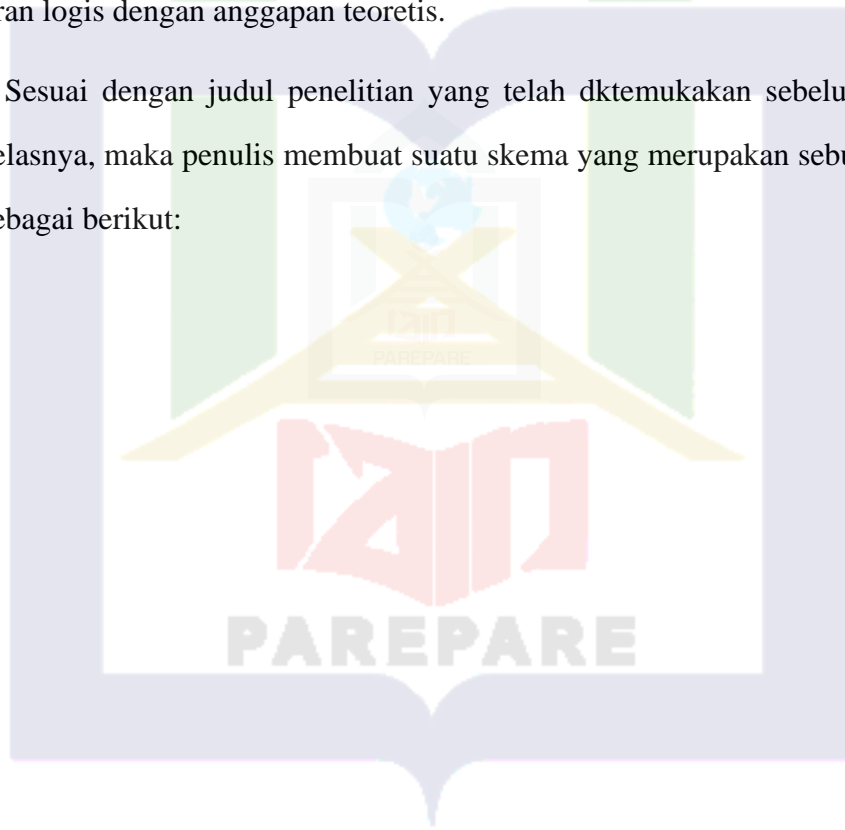
Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terhubung secara rumit oleh norma, kebiasaan, hukum, dan struktur bersama yang mempromosikan keberadaan komunal. Masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup berdampingan dan berkolaborasi untuk memajukan tujuan bersama. Lingkungan mereka sudah memiliki struktur sosial dengan aturan dan praktik yang diterima.

³⁹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

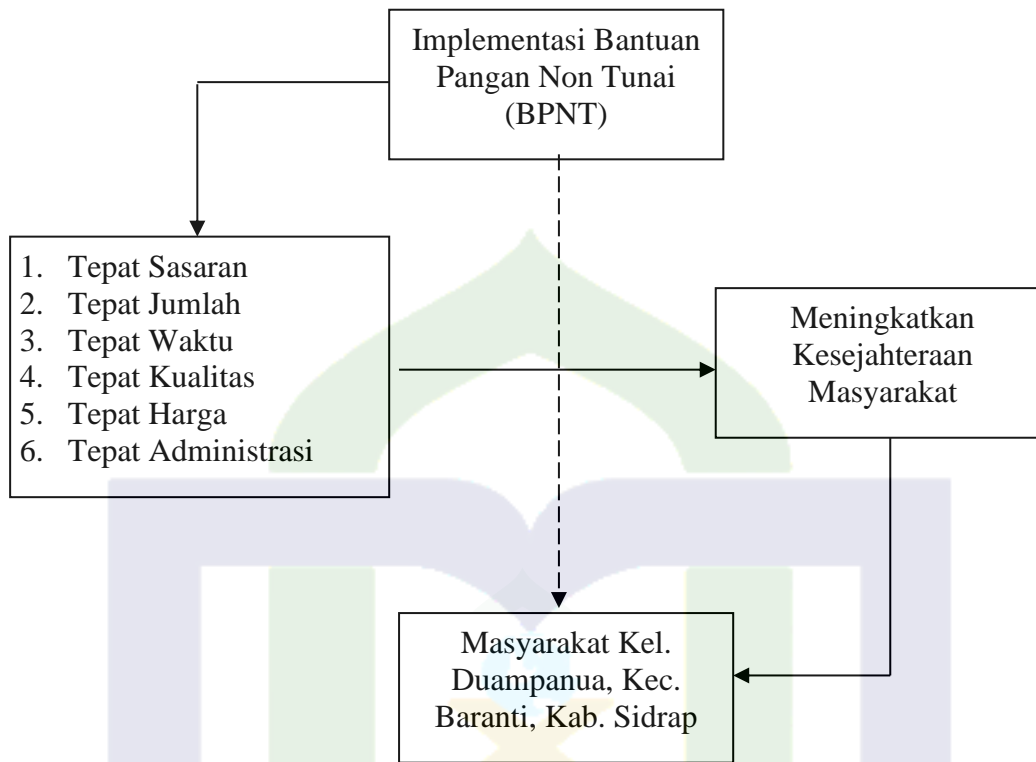
D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian.⁴⁰ Kerangka konseptual untuk pemecahan masalah telah ditemukan atau ditetapkan, dan istilah "kerangka berpikir" mengacu pada deskripsi, penjelasan, atau pernyataan tentang hal itu. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan narasi tersebut dengan menggabungkan penalaran logis dengan anggapan teoretis.

Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema yang merupakan sebuah kerangka pikir sebagai berikut:



⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.76.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan strategi ini, peneliti akan memberikan ringkasan umum penyelidikan analitis ke dalam dinamika interaksi antara fenomena yang diamati. Sementara jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang merupakan teknik untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau kondisi nyata, melibatkan pendokumentasian dan pengumpulan berbagai fakta dan informasi yang ditemukan di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang diperoleh dari buku.⁴¹

Adapun data yang diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan data peneliti turun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁴² Penelitian ini menganalisa mengenai implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Duampanua.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

⁴¹Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

⁴²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.40.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan, menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus di kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap), sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah ketepatan penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Duampanua.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan skunder :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung, memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang didapatkan secara langsung, data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴³ Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat kelurahan Duampanua dan beberapa masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tentang masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua.

2. Data Sekunder

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari buku-buku resmi, buku-buku tentang topik penelitian, laporan, tesis, dan sumber lain yang dapat membantu penulis dalam penelitian mereka. Dokumentasi merupakan sumber data tambahan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi penelitian yang dikumpulkan yang tidak secara khusus dimaksudkan untuk digunakan untuk pengumpulan data.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam prosesnya. Berikut adalah strategi pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Dimungkinkan untuk mendapatkan data penelitian dengan observasi dan penginderaan menggunakan pendekatan pengumpulan data ini. Pengamatan itu dilakukan dalam skenario nyata atau dalam situasi yang diadakan, Observasi adalah pengamatan di mana peneliti benar-benar mengamati gejala-gejala item yang diperiksa. Pengamatan langsung digunakan untuk memperoleh data untuk penyelidikan ini. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk memantau bagaimana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan di Desa Duampanua..

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki dan mempelajari sesuatu dari

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.137.

informasi yang lebih mendalam terkait penelitian. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan narasumber yang dianggap perlu untuk mengambil informasi tentang permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan kecamatan Duampanua dan beberapa desa Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT, di mana informan akan ditanyai berbagai pertanyaan dan juga diminta untuk menjawab secara lisan.

3. Dokumentasi

penggunaan dokumen pribadi, seperti komposisi atau catatan tertulis tentang kegiatan, pengalaman, dan pandangan seseorang, khususnya yang berkaitan dengan adat perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang keadaan sosial dan signifikansi dari banyak aspek seputar topik penelitian, namun tidak menutup kemungkinan pencatatan verbal dari buku, catatan, majalah, surat kabar, transkrip dari internet, dan sumber lain yang langsung. terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.⁴⁶

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menelaah data yang diperoleh serta untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah.

1. Uji kredibilitas (*creadibility*)

Data penelitian peneliti harus lolos “uji kredibilitas” atau “uji kepercayaan” agar hasil penelitian dapat diterima sebagai karya ilmiah yang sah.

2. Uji dipendabilitas (*dependability*)

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.160.

⁴⁶Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

Reliabilitas adalah istilah penelitian kualitatif untuk tes ketergantungan. Jika pembaca dapat meniru metode penyelidikan peneliti, maka penelitian kualitatif dianggap dapat dipercaya. Menilai ketergantungan dengan meminta auditor atau penyelia meninjau prosedur studi lengkap yang dilakukan peneliti.⁴⁷

G. Analisis Data

Transkrip dan bahan lain yang telah dikumpulkan disiapkan dan dirasakan selama proses analisis data. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman mereka terhadap data sehingga mereka dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain secara lebih efektif mengenai apa yang telah ditemukan atau diperoleh di lapangan. Data mentah yang telah dikumpulkan peneliti dapat digunakan melalui teknik pengelolaan data.

Dalam mengelola data yang telah terkumpul, analisis data sangat penting untuk mendapatkan makna dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah guna menentukan bagaimana pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. studi kasus di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap). Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi, yang kemudian dituangkan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan surat-surat pribadi, dokumen resmi, foto,

⁴⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 194

foto, dan media lainnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode berbeda: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengidentifikasi, memusatkan, dan mengabstraksi data yang berasal dari rekaman lapangan. Data akan disederhanakan sebagai hasil dari pengurangan ini, sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, hanya temuan studi yang paling relevan dari daerah yang dipilih untuk digunakan.

3. Penyajian Data

Model data, yang merupakan fase utama kedua dalam operasi analisis data, digunakan untuk menggambarkan data dalam berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Agar peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi, menarik kesimpulan yang didukung oleh data, dan melanjutkan ke tingkat analisis berikutnya yang mungkin direkomendasikan oleh model, semuanya dibuat untuk merekam informasi yang diatur dengan cara yang praktis dan mudah diakses.

4. Penarikan Simpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan usaha untuk menginterpretasikan data berdasarkan pengetahuan peneliti. Membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai temuan penelitian yang telah dilakukan pada tahap ini meliputi melakukan survei (*orientasi*), wawancara, observasi, dokumentasi, dan mencoba mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan pengecekan ulang..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penghasil beras terbanyak. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak sekitar 183 kilometer (km) sebelah utara Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan terletak antara $3^{\circ}43'$ dan $4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'$ dan $120^{\circ}10'$ Bujur Timur. Karena letak geografisnya yang berada di tengah semenanjung Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Dibandingkan dengan tempat lain, Kabupaten Sidenreng Rappang lebih diuntungkan dari letak geografisnya karena memiliki akses yang luas dan mudah dari segala daerah.

Secara administratif Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan langsung dengan tujuh Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo.
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.
- 3) Sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare.
- 4) Sebelah Utara dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

Terdapat sekitar 301.972 jiwa yang mendiami wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 1.102,10 km² (atau 3,01 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan). Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riawa, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, Watang Pulu, Maritengngae, Kulo, Panca Lautang, Panca Rijang, dan Baranti merupakan 11 kecamatan yang membentuk

Kabupaten Sidenreng Rappang. Akan ada studi yang dilakukan di Distrik Baranti di berbagai komunitas berbeda. Secara administratif Kecamatan Baranti terdiri dari 4 (empat) Desa (Sipodeceng, Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang) dan 5 (lima) Kelurahan (Kelurahan Baranti, Panreng, Duampanua, Manisa, dan Benteng). Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang digunakan sebagai obyek penelitian. Karena struktur organisasi desa yang kurang memadai dan kesiapan administrasi yang kurang, maka Desa Sipodeceng tidak dijadikan objek kajian.⁴⁸

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Implementasi Tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Mulai tahun 2018, penyaluran BPNT akan dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia dengan infrastruktur dan akses yang memadai, salah satunya Desa Duampanua di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Melalui akses layanan keuangan yang lebih luas, penyaluran BPNT diantisipasi akan berpengaruh pada Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima.

Agar KPM tumbuh dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, BPNT berupaya mengurangi beban keuangan dan memberikan makanan yang lebih bergizi kepada KPM secara tepat waktu dan sesuai.

Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima para penerima manfaat, yakni Rp200 ribu perbulan. Sekretaris Dinas Sosial Sidrap, Hj.

⁴⁸“Profil kabupaten Sidenreng Rappang” diakses dari <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16>, pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 13.18.

Nurhidayah mengatakan, bantuan yang disalurkan saat ini bukan dalam bentuk sembako akan tetapi berbentuk tunai.

Bercocok tanam, buruh tani, dan pekerjaan konstruksi merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranri Kabupaten Sidrap merupakan salah satu penghasil telur bebek, telur ayam, dan beras terbesar, masyarakat Kecamatan Baranti masih ada yang hidup dalam kemiskinan dengan gaji rata-rata per bulan Rp 1.000.000. tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka untuk makanan dan kebutuhan lainnya selama sebulan. Pemerintah menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulan sebagai salah satu cara untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan wawancara oleh penerima BPNT ibu Suriyana beliau mengatakan bahwa :

“saya merupakan salah satu penerima bantuan pangan non tunai dari Kelurahan Duampanua sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan berbagai macam pangan salah satunya adalah beras dan berbagai bahan sembako lainnya sehingga dapat meringankan sedikit beban pengeluaran saya.”⁴⁹

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Suriyati Ressay, selaku pemilik *E-warong* BPNT Kelurahan Duampanua, beliau mengatakan bahwa:

“Program BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima BPNT atau masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau masyarakat miskin setiap bulannya. Dengan ini, bisa sedikit membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya agar kebutuhan lainnya masih tetap terpenuhi, ”⁵⁰

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Suriyana, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 09.30 WITA

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressay, selaku pendamping program PNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA

Kemudian Ibu Suriyati Ressang menyebutkan kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beliau menyatakan sebagai berikut:

“Adapun kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dek, yaitu keluarga miskin atau rumah tangga miskin dan juga hanya mempunyai emas 5 gram”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu penerima BPNT, yaitu Bapak Jamaluddin yang mengatakan bahwa:

“Saya adalah seorang yang bekerja sebagai buruh tani dan istri saya hanya IRT dengan penghasilan dalam sebulan tidak stabil, kurang lebih Rp. 1.000.000, itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya tetapi dengan adanya BPNT ini bisa sedikit membantu perekonomian saya. Tapi saya tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan oleh pegawai Kelurahan. Saya hanya diminta datang dan membawa Kartu Penerima Manfaat (KPM) saya, tetapi ada yang mengatakan yang didapatkan sebanyak Rp.200.000.”⁵²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari percakapan dengan Pak Jamaluddin, seorang buruh tani berpenghasilan sekitar Rp 1.000.000 per bulan yang istrinya sebagai IRT. Pak Jamaluddin dan istrinya tinggal di rumah kayu dengan listrik untuk lampu, kamar mandi, dan kompor gas untuk bahan bakar memasak.

Menurut temuan wawancara, Pak Jamaluddin tidak yakin berapa persisnya bantuan yang dia terima. Karena pihak kelurahan hanya menginstruksikannya untuk membelanjakan uang di *e-warong* yang ditunjuk dengan membeli bahan-bahan yang kemudian dijadikan makanan, ia tidak menyadari minimnya bantuan yang diberikan kepadanya.

⁵¹Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressang, selaku pendamping program PNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA.

⁵²Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.45 WITA.

Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada masyarakat yang menerimanya, pernah disalurkan tidak pernah terlambat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhayati, beliau mengatakan bahwa :

“Saya adalah salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti. Dalam hal ini saya menerima bantuan ini dengan tepat waktu Rp. 200.000/bulan.”⁵³

perkataan bahwa program ini sudah 2 bulan sudah tidak disalurkan, hal ini ditegaskan oleh Ibu Suriyati Ressang selaku pemilik *E-Warong* BPNT Kelurahan Duampanua, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dek, tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyaluran BPNT ini, itupun kalau ada hanya akan terjadi keterlambatan tanggal, dengan ini diharapkn benar-benar membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok.”⁵⁴

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulan melalui rekening bank kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk keperluan pembelian bahan makanan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial serta untuk mendukung inklusi keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai sumber pendanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB), dan sumber-sumber pengeluaran lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber uang untuk pelaksanaan BPNT.

⁵³Wawancara dengan Ibu Nurhayati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.30 WITA

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressang, selaku pemilik *e-warong* program BPNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA

Pasal 1 dan 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengatur tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai menyebutkan sebagai berikut:⁵⁵

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Bantuan Pangan Non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

Kebutuhan pangan sangat penting untuk penyediaan pola makan yang sehat dan seimbang, dan Program BPNT dapat membantu meringankan beban biaya keluarga yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, membebaskan uang yang seharusnya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena siklus kesejahteraan masyarakat Kecamatan Duampanua yang sering berubah, banyak KPM pengguna BPNT yang memiliki data yang harus dimutakhirkan dan dievaluasi dengan baik

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tepat sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kel. Duampanua, Kec, Baranti, Kab. Sidrap.

Program BPNT dilaksanakan di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, dan Kabupaten Sidrap agar masyarakat dapat mandiri dalam bertransaksi

⁵⁵Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai.

secara nontunai Program BPNT di *e-Warong* dan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi seperti sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang sebelumnya tidak mampu karena daya beli mereka meningkat.. Meningkatkan efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai dalam penyediaan sembako dan mendorong inklusi keuangan, khususnya dengan mendorong anggota masyarakat untuk memulai usaha sendiri. Dengan bermitra dengan masyarakat untuk menumbuhkan keterampilan kewirausahaan melalui BPNT, pemerintah membantu mencegah penyalahgunaan bantuan keuangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat dibatasi menggunakan dananya hanya untuk pembelian beras dan telur selama menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan perekonomian keluarga berpenghasilan rendah di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap perlu adanya implementasi faktor yang mendukung atau mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi organisasi ke organisasi termasuk di antara empat variabel atau faktor ini.

1) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan adalah proses transfer pengetahuan tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Para pelaku kebijakan harus mengumpulkan informasi tentang kebijakan publik untuk memahami isi, tujuan, arah, dan khalayak sarannya. Ini akan memungkinkan mereka untuk merencanakan dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan

kebijakan publik sehingga tujuan mereka dapat terpenuhi. terealisasi seperti yang diantisipasi.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warong* di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pada awal implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antaraktor dari tingkat Kelurahan maupun pusat. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementrian Sosial sudah memberikan sosialisasi baik standar, tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Agar masyarakat lebih memahami detail program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka temuan sosialisasi tersebut dikomunikasikan kepada warga kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. KPM mendapatkan pelayanan sosialisasi yang diberikan di Kelurahan oleh Dinas Sosial dengan bantuan para pembantu. Pada tahap ini, semua KPM berkumpul di kelurahan, dan menjelaskan secara menyeluruh persyaratan, maksud, dan tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, pendamping sering berkomunikasi dengan publik selama transaksi di E-warong dalam program Bantuan untuk memastikan bahwa mereka mengerti, untuk memastikan komunikasi organisasi-ke-organisasi yang efektif.⁵⁶

2) Sikap (Disposisi)

Disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan yang tulus dari para pelaku kebijakan untuk mengejar tujuan kebijakan. Pelaksana dalam program ini telah memenuhi tanggung jawab, prinsip, dan kewajiban masing-masing, khususnya di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti. Sikap

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Andi Mappabeta Koro selaku Aparat Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 16/06/2023, pukul 10.00 WITA

pelaksanaan program *E-warong* BPNT yang dalam hal ini pendamping BPNT, Pemilik *E-warong*, bank penyalur, dan pihak lainnya cukup optimal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pelaksana untuk menjalankan program BPNT ketika menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program BPNT untuk terus meningkatkan program pemerintah menjadi lebih baik. Pelaksanaan program BPNT, meskipun mendapat dukungan dan dedikasi Kelurahan Duampanua, belum berhasil dibuktikan dengan ketidakakuratan data yang dikumpulkan dari masyarakat tentang penerimaan program (BPNT).⁵⁷

3) Sumber Daya

Memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan fasilitas yang dapat membantu dan mempromosikan implementasi yang efisien akan menentukan seberapa sukses suatu kebijakan diimplementasikan. Tujuan sumber daya manusia adalah untuk menentukan siapa yang mengimplementasikan program di lapangan dan seberapa baik para pelaksana menyadari tanggung jawab mereka. Sedangkan penentuan sumber dana yang diterima terkait dengan program BPNT adalah tujuan dari sumber daya keuangan (financial). Waktu eksekusi adalah sumber daya waktu. Sumber daya fasilitas yang diperlukan untuk proses implementasi sudah tersedia.. Sumber daya manusia dan non-manusia diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Efektivitas proses implementasi kebijakan juga akan tergantung pada seberapa baik sumber daya digunakan. Tentu saja, sebuah kebijakan tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud tanpa dukungan sumber daya manusia, keuangan, dan waktu. Komponen yang paling krusial dalam

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Andi Mappabeta Koro selaku Aparat Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 16/06/2023, pukul 10.00 WITA

implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Untuk memenuhi tujuan kebijakan, diperlukan sumber daya yang kompeten untuk pelaksanaan program.

Tak dapat dipungkiri, para pelaku yang masuk dalam lingkup Kelurahan ini tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping Kelurahan, lurah, pemilik *e-Warong* dan masyarakat setempat yang ikut membantu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Duampanua Kecamatan baranti Kabupaten Sidrap. Peran aktor pelaksana sangat penting karena tanpa partisipasi mereka, kebijakan jelas tidak akan berjalan dengan baik. Karena keterlibatannya, program ini juga yang menentukan apakah pemerintah kecamatan berhasil atau tidak. Kementerian Sosial segera mentransfer Rp200.000 setiap bulan ke rekening KPM sebagai sumber pembiayaan atau pembiayaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Sumber daya keuangan tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kriteria BPNT untuk pelaksanaan bantuan pangan nontunai. Sumber daya waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai telah berhasil. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala. Fasilitas bantuan yang di terima KPM juga kualitasnya bagus, layak untuk di konsumsi.⁵⁸

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Andi Mappabeta Koro selaku Aparat Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 16/06/2023, pukul 10.00 WITA

4) Struktur Birokrasi

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN BARANTI**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Baranti

Menurut Bapak Andi Mappabeta Koro menjelaskan bahwa:

“Disetiap kebijakan pemerintah tidak jauh juga dari masalah terutama pada saat pendataan. Sebenarnya telah berkali-kali diberitahukan bahwa kami aparat desa hanya menerima data yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk penerima bansos nya terutama di BPNT, kan bantuan ini berupa barang bukan uang jadinya masyarakat banyak yang protes terhadap kenapa saya tidak dapat kenapa dia dapat. Kami mencoba menjelaskan mekanismenya dan kami juga member tau ke Dinas Sosial terhadap masalah ini, cuma ya mau bagaimana, proses dan proses dan prosedurnya sudah ditetapkan oleh pusat”⁵⁹

Dalam proses memecahkan sebuah masalah kebijakan BPNT seluruh staf di Kecamatan Baranti ikut andil dalam penyelesaiannya seperti yang disampaikan

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Andi Mappabeta Koro selaku Aparat Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 16/06/2023, pukul 10.00 WITA

Bapak Andi Mappabeta Koro, prosesnya menjelaskan secara terperinci terhadap masyarakat. Di Kecamatan Baranti walaupun terdapat penduduk pendatang yang dari luar yang tinggal disana. Meskipun mereka layak menerima BPNT namun tetap diutamakan data yang dulu. Meskipun begitu banyak juga masyarakat yang dulunya menerima BPNT yang sekarang sudah layak maksudnya disini sudah mampu jadi tidak mendapatkannya lagi.

3. Implementasi tepat Sasaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Di masyarakat, kemiskinan merupakan isu yang sering muncul, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu Bantuan Sosial yang disalurkan oleh pemerintah secara non tunai dan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui rekening bank ke digunakan untuk membeli makanan yang telah ditentukan.

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.⁶⁰

- 1) Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa

⁶⁰ Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2017), h. 8.

yang terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi identitas.

- 2) Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan.
- 3) Tepat harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya.
- 4) Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi.
- 6) Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Pada setiap kelurahan mempunyai satu pendamping BPNT untuk terlaksananya BPNT dengan baik. Pemilik *E-Warong* pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap bernama Ibu Suriyati Ressay.⁶¹ Dalam pemilihan yang dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT ini tidak serta merta di tentukan langsung dari pusat (kementerian Sosial RI) tetapi melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kriteria dalam pemelihan pelaksanaan program Bantaun Pangan Non Tunai adalah tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain itu adanya komitmen daerah juga tak kalah penting untuk melaksanakan program ini. Komitmen daerah

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressay, selaku pemilik *E-warong* program PNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA

yang dimaksud adalah adanya dukungan penuh untuk menjamin ketersediaan dalam pelayanan yang merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pelaksanaan program BPNT di suatu daerah harus memenuhi tingkat pencapaian tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Dengan ini, berdasarkan data yang diperoleh pada lapangan sebagai berikut :

- 1). Tepat Sasaran : Karena kurang mampu atau miskin, hanya KPM keluarga penerima BPNT yang mendapatkan BPNT. Keluarga-keluarga ini kemudian didaftarkan dan diberi tanda pengenal Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Keluarga yang dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan keadaan sosial ekonomi 25% terendah di wilayah pelaksanaan pilihan Kementerian Sosial adalah sasaran penerima program. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dikonfirmasi dan disahkan oleh Pemerintah Daerah merupakan asal dari daftar KPM BPNT.⁶²

⁶²Rangkuman informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Duampanua yaitu Ibu Mulyati, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau menurut pendapat saya dalam pendataan penerimaan BPNT ini masih kurang sesuai dek dikarenakan ada beberapa kecemburuan sosial. Dimana ada yang lebih membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai ini. Tetapi saya dengar juga akan ada penambahan untuk penerima BPNT ini. Dan Alhamdulillah dengan bantuan ini bisa membantu saya meringankan beban kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari keluarga saya selaku penerima bantuan pangan non tunai ini.”⁶³

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Ibu Nurhayati sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai salah satu KPM pada program BPNT mengucapkan sangat suka pada pelaksanaan program ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran sehingga keluarga yang seharusnya mendapatkan program ini masih belum terdata, tetapi adapula yang mengatakan akan ada penamahan pada datanya dek.”⁶⁴

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Suriyati Ressayang, beliau menjawab sebagai berikut:

“Pada penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat 1083 orang yang terdaftar sebagai KPM dek, data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pusat. Kalaupun ada tambahan data untuk penerima BPNT ini saya menunggu dari pihak atasan saya yang di Kecamatan terus ke Kelurahan. Saya ini adalah pemilik e-warong yang menjadi tempat menukar kartu dengan sembako pada program ini di Kelurahan Duampanua.”⁶⁵

⁶³Wawancara dengan ibu Mulyati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.10 WITA.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Nurhayati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.30 WITA.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressayang, selaku Pemilik *E-Warong* program BPNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas mengenai ketepatan sasaran pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua dapat disimpulkan bahwa BPNT Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap belum tepat sasaran karena masing-masing ada beberapa masyarakat yang ekonominya tidak mampu dan belum terdata sebagai penerima pada program BPNT ini sehingga masih timbul kecemburuan.

3. Tepat Jumlah : jumlah saldo yang menjadi hak penerima manfaat Rp. 200.000/bulan melalui kartu elektronik tersebut.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara mengenai ketetapan jumlah dari program BPNT untuk Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Berikut wawancara dari Ibu Suriyati Ressang mengatakan bahwa :

“Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yaitu Rp. 200.000/bulan. Tidak ada tindakan penarikan dari pihak manapun dan penyaluran BPNT ini langsung disalurkan melalui kartu elektronik masing-masing penerima. Hanya saja ketika BPNT sudah keluar masing-masing penerima menukarkan semako berupa beras 10kg dan juga telur di *E-Warong*.⁶⁶

Begitupula hasil wawancara dari penerim program BPNT ini salah satunya yaitu ibu Nurhayati, beliau mengatakan bahwa :

“Saya selalu mendapatkan jumlah bantuan yang sama sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, kemudian uangnya di tranfser melalui kartu elektronik berwarna merah kemudian ditukarkan menjadi beras 10kg dan telur di *E-Warong*.⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressang, selaku pemilik *e - warung* program BPNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Nurhayati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.30 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan yang sudah di paparkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa selama ini pembagian pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sudah sangat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada potongan , sehingga dapat disimpulkan Bantuan Pangan Non Tunai sudah tepat Jumlah.

- 2) Tepat Waktu : waktu pelaksanaan BPNT kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai dengan rencana.

Pada pelaksanaan program BPNT pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti dilakukan setiap satu bulan sekali dan tidak pernah terjadi keterlambatan pencarian, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu :

Menurut Bapak Jamaluddin penerima BPNT mengatakan hal yang sama seperti diatas, berikut kutipan wawancaranya :

”Program BPNT ini selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, bahkan pernah juga bukan waktunyaapun sudah keluar.”⁶⁸

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diatas, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dilaksanakan sudah sesuai atau tepat pada waktunya. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa BPNT di Kelurahan Duampanua sudah tepat pada waktunya.

- 3) Tepat Harga : Harga tebus yang sudah ditetapkan pada BPNT.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.45 WITA.

Pada program BPNT ini sebenarnya tidak dikenakan biaya sepeserpun oleh peserta KPM. KPM cukup membawa kartu elektronik ke *E-warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah melakukan kerjasama dengan Bank Penyalur. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berikut wawancara dari Ibu Suriyana :

“Sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai ini setiap bulan selalu saya ambil dengan gratis, tidak pernah saya bayar sepeserpun. Saya hanya membawa kartu ATM saja lalu saya tukarkan di *E-warong*.”⁶⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Mulyati, beliau menjelaskan bahwa :

“Pada Kelurahan Duampanua semua penerima program BPNT tidak membayar sepeserpun untuk menebus sembako tersebut. Jika bantuan sudah datang saya hanya tinggal ke *E-warong* dengan membawa kartu ATM terus ditukar.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti sudah tepat harga dan tidak mengambil biaya sepeserpun dengan kata lain gratis.

- 4) Tepat Kualitas : kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Ibu Nurhayati berkaitan dengan ketetapan pada kualitas penyaluran bantuan BPNT sebagai berikut:

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Suriyana, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 09.30 WITA.

⁷⁰Wawancara dengan ibu Mulyati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.10 WITA

“pada bantuan sembako ini berupa beras dan telur yang saya terima waktu itu layak untuk di konsumsi, karena beras yang saya terima dikala itu bersih dan tidak bau, untuk telur yang saya terima juga sangat bagus. Dan setiap bulannya sembako yang saya terima selalu sama dan tidak pernah berubah, kualitasnya tetapp bagus.”⁷¹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah kualitas beras dan telur atau sembako yang terima sangat bagus tidak berbau atapun berwarna. Sehingga dengan ini disimpulkan semako yang diterima sangat berkualitas.

- 5) Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap tidak ada persyaratan yang mengharuskan dalam menerima beras dan telur. Hanya saja pada awal pendataan ada persyaratan yaitu KPM pada program penerimaan BPNT yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu elektronik atau ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai, yang dikumpulkan fotocopy KK dan KTP setelah itu kartu dapat diambil di kecamatan Baranti. Kartu yang digunakan pada penyaluran ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama penerima BPNT dari keluarga miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketetapan administrasi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti sudah termasuk tepat administrasi.

⁷¹Wawancara dengan Ibu Nurhayati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.30 WITA

Berdasarkan indikator 6T diatas bahwasanya program BPNT pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidaktepat sasaran yang masih belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Dalam hal ini ketidaktepat sasaran menunjukkan bahwa data yang di peroleh masih ada keluarga yang kurang mampu yang belum mendapat program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) ini. Karena ada yang mendapatkan bantuan ini tapi masih dalam kategori mampu dalam hal ini mereka masih memiliki lahan pertanian dan lain sebagainya. Dengan kurangnya ketepatan sasaran ini timbul kecemburuan, yang membuat keluarga yang kurang mampu merasa iri dengan yang mampu. Dalam hal ini penetapan nama rumah tangga harusnya bisa lebih efektif lagi kedepannya benar-benar dilakukan secara objektif, tidak semata-mata mengedepankan keluarga yang keadaan ekonominya mampu.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan hanya ada 5 indikator yang dapat di penuhi pada program BPNT ini yang sudah terlaksana dengan baik yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tetap administrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulan melalui rekening bank kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk keperluan pembelian bahan makanan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial serta untuk mendukung inklusi keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai sumber pendanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB), dan sumber-sumber pengeluaran lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber uang untuk pelaksanaan BPNT.

Kebutuhan pangan sangat penting untuk penyediaan pola makan yang sehat dan seimbang, dan Program BPNT dapat membantu meringankan beban biaya keluarga yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, membebaskan uang yang seharusnya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena siklus kesejahteraan masyarakat Kecamatan Duampanua yang sering berubah, banyak KPM pengguna BPNT yang memiliki data yang harus dimutakhirkan dan dievaluasi dengan baik

2. Hasil penelitian yang telah dicapai melalui pelaksanaan Program BPNT ini memerlukan dukungan sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi antar organisasi, dengan dukungan dan peran seluruh elemen program agar dapat terlaksana dengan baik. Bahwa program BPNT Kelurahan Duampanua yang telah dijalankan dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam bertransaksi nontunai di Program *e-Warong* BPNT dan mendukung

perekonomian masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi beban masyarakat. belanja dari masyarakat yang sebelumnya tidak mampu dan kini semakin meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan efektivitas bansos nontunai dalam penyediaan sembako dan mendorong inklusi keuangan, khususnya dengan mendorong anggota masyarakat untuk memulai usaha sendiri. Dengan membuat *e-Warong* BPNT, pemerintah merangkul masyarakat dalam pengembangan kemampuan berwirausaha, memastikan dana bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak disalahgunakan. Kartu Keluarga Sejahtera Elektronik (KKS) membatasi penggunaan dana masyarakat untuk pembelian beras dan telur.

3. Berdasarkan indikator 6T diatas bahwasanya program BPNT pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidaktepat sasaran yang masih belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Dalam hal ini ketidaktepat sasaran menunjukkan bahwa data yang di peroleh masih ada keluarga yang kurang mampu yang belum mendapat program Bantaun pangan Non Tunai (BPNT) ini. Karena ada yang mendapatkan bantuan ini tapi masih dalam kategori mampu dalam hal ini mereka masih memiliki lahan pertanian dan lain sebagainya. Dengan kurangnya ketepatan sasaran in timbul kecemburuan, yang membuat keluarga yang kurang mampu merasa iri dengan yang mampu. Dalam hal ini penetapan nama rumah tangga harusnya bisa lebih efektif lagi kedepannya benar-benar dilakukan secara objektif, tidak semata-mata mengedepankan keluarga yang keadaan ekonominya mampu.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Sebaiknya data penerima bantuan pangan non tunai selalu di perbaharui dan melakukan survey lanjutan. Kemudian survey dilakukan secara 3 bulan sekali sembari mengontrol keluarga penerima manfaat untuk mengetahui apakah dengan adanya BPNT ini bisa membantu keadaan ekonomi suatu keluarga.
2. Diharapkan perlu adanya transparasi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Amelia, Yovinda Rizki. *Model Tingkat Kemiskinan Kabupaten.Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2016)* Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Setia Purna Inves. 2007.
- Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Maret 2022, diakses pada <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/presentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persem.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Basri, Ikhwan AbidiN. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Curatman, Aang, *Teori Ekonomi Makr*. Yogyakarta: Swagati Press, 2010.
- Dura, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Jibeka*, Volume. 10, No. 1.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jerzey: Pricenton University Press, 1980.
- Kementorerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: 2017.
- Khomsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekolobi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. 2015.
- Masta, Megayana. *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus*, skripsi. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai.

- “Profil Sidenreng Rappang” <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16>, pada tanggal 1 Juli 2023.
- Rangkuman informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019.
- Siregar, Anggi Anggrayni. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*. Tesis Universitas Sumatera Utara: 2019.
- Sjafari, Agus. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alvabeta, 2013.
- Sukmasari, Dahliana. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an, *At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Susila, Ismet *Implementasi Dimensi Layanan Public dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Syauqi, Ahmad. *Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Program Beras Miskin di Kota Banjarmasin*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2011.
- Tsabit, Ahmad Majdi. *Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*.
- Umama, Umaima. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam).” DIKTUM Jumal Syariah dan Hukum 12:2, 2014.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Wawancara dengan Bapak Andi Mappabeta Koro selaku Aparat Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 16/06/2023, pukul 10.00 WITA.
- Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.45 WITA.
- Wawancara dengan ibu Mulyati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.10 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Nurhayati, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 10.30 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Suriyana, penerima program BPNT Kelurahan Duampanua pada tanggal 15/06/2023, pukul 09.30 WITA.
- Wawancara dengan Ibu Suriyati Ressay, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Duampanua, pada Tanggal 15/06/2023, pukul 10.00 WITA.
- Widodo, Joko . *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006.

Zulbaidah. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*
(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).



LAMPIRAN



I. Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Ayu Ariska
NIM : 19.2400.046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
dalam Peningkatkan Kesejahteraan di Kel.
Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan aparat kelurahan Duampanua

1. Apa yang dimaksud program BPNT?
2. Apa saja kriteria masyarakat yang layak untuk menjadi penerima BPNT?
3. Bagaimana mekanisme dan syarat penerimaan BPNT?
4. Berdasarkan data, apakah program BPNT di kelurahan Duampanua telah sesuai dan tepat sasaran dalam penyalurannya?
5. Apakah masyarakat yang menerima BPNT di kelurahan Duampanua benar-benar layak?

6. Berapa jumlah/nominal yang diterima oleh penerima BPNT di kelurahan Duampanua?
7. Bagaimana prosedur mengenai waktu penerimaan BPNT di kelurahan Duampanua?
8. Apakah program BPNT di kelurahan Duampanua pernah mengalami keterlambatan?
9. Bagaimana kualitas bahan pangan yang disediakan untuk penerima BPNT di kelurahan Duampanua?
10. Apakah harga bahan pangan di e-warong sama dengan harga bahan pangan di pasaran?
11. Bagaimana administrasi penerimaan BPNT di kelurahan Duampanua?
12. Apakah penerima BPNT dapat diganti atau dicabut dari daftar penerima BPNT?
13. Jika iya, apa yang menjadi faktor sehingga penerima tersebut dicabut dari daftar penerima BPNT?
14. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program BPNT di kelurahan Duampanua
15. Dengan adanya implementasi program BPNT, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua?

Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat BPNT

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penerima BPNT?
2. Menurut bapak/ibu, apakah program BPNT di kelurahan Duampanua telah tepat sasaran?
3. Apakah bapak/ibu tahu jumlah/nominal dari program BPNT jika ditunaikan?

4. Apakah jumlah tersebut sesuai dengan bahan panga yang bapak/ibu terima?
5. Normalnya, setiap berapa bulan sekali bapak/ibu menerima program BPNT?
6. Apakah bapak/ibu pernah terlambat menerima BPNT?
7. Bagaimana prosedur penerimaan/pencairan program BPNT?
8. Bagaimana kualitas bahan pangan yang anda terima dari e-warong BPNT?
9. Apakah harga bahan pangan di e-warong sama dengan harga bahan pangan di pasaran?
10. Bagaimana perbandingan kondisi kesejahteraan bapak/ibu sebelum dan setelah menjadi penerima BPNT?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 Januari 2023

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.)
NIP. 19700627 200501 1 005

(Hj. Fahmiah Akilah, M.M.)
NIP. 19880612 201903 2 009

II. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3195/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AYU ARISKA
 Tempat/ Tgl. Lahir : BARANTI, 11 NOVEMBER
 NIM : 19.2400.046
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : KELURAHAN DUAMPANUA, KECAMATAN BARANTI,
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 Juni 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

III. Surat Izin Penelitian Dari dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Sidrap



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 298/IP/DPMTSP/6/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **AYU ARISKA** Tanggal **13-06-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.3195/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/20**; Tanggal **12-06-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **AYU ARISKA**
ALAMAT : **JL. POROS PINRANG, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP)**

LOKASI PENELITIAN : **DUAMPANUA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **10 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 13-06-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA KELURAHAN DUAMPANUA
2. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
3. DEKAN FAKULTAS FEBI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

IV. Identitas Informan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307
	SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMALUDDIN
Alamat : Baranti
Pekerjaan : Petani
Menerangkan bahwa
Nama : Ayu Ariska
Nim : 19.2400.046
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap).”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap , 15 Juni 2023


(.....)
Jamaluddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muliati
Alamat : Passano
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Ayu Ariska
Nim : 19.2400.046
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap).”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Juni 2023


(.....
Muliati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SURIYANA*

Alamat : *Baranti*

Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa

Nama : Ayu Ariska

Nim : 19.2400.046

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara utnutk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap).”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap , 15 Juni 2023

(Suriyana)
.....
Suriyana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHAYATI

Alamat : Paserro

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Ayu Ariska

Nim : 19.2400.046


Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap).”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap , 15 Juni 2023


(.....)
Nurhayati

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SURIYATI RESSANG*

Alamat : *Parepare*

Pekerjaan : *IRT.*

Menerangkan bahwa

Nama : Ayu Ariska


Nim : 19.2400.046

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara utnutk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap).”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap , 15 Juni 2023


 (...suriyati Ressang...)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI
KELURAHAN DUAMPANUA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO.147.100/300/KDP/2022

Yang bertanda di bawah ini

N A M A : ANDI MAPPABETA KORO
J A B A T A N : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AYU ARISKA
Nim : 19.2400.046
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Laode Kel. Duampanua Kec. Baranti

Yang tersebut namanya diatas benar-benar telah mengadakan Penelitian dan pengambilan data pada Kelurahan Duampanua, tanggal 10 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kel. Duampanua, Kec.Baranti, Kab. Sidrap)."

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



V. Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Jamaluddin selaku penerima BNPT



Wawancara bersama Ibu Suriyana selaku penerima BNPT



Wawancara bersama Ibu Mulyati selaku penerima BNPT



Wawancara bersama Ibu Nurhayati selaku penerima BNPT



Wawancara bersama Ibu Suriyati Ressay selaku pemilik *E-warong* program BNPT



Wawancara bersama Aparat Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti



Kartu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)



Salah satu rumah masyarakat dari penerima BPNT



BIOGRAFI PENULIS



Ayu Ariska merupakan nama penulis pada skripsi ini, penulis lahir pada tanggal 11 November 2000 dari pasangan yang bernama Kamaruddin dan Murni. Penulis adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara. Lahir di Passeno, Kabupaten Sidenreng Rappang. Menempuh pendidikan di SDN 6 Baranti pada tahun 2007/2008 dan selesai pada tahun 2012/2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baranti pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di MAN Baranti (MAN Sidenreng Rappang) selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dan mengambil program studi Ekonomi Syariah pada fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI).

Dengan ini penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.”